

FENOMENA REDENOMINASI DAN KORELASINYA DENGAN INFLASI

**Wiwit Apit Sulistyowati
Agung Yulianto**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Email :wiwit_apit@yahoo.co.id

ABSTRACT

Simplification program the number of digits in the denomination currency without reducing its value is considered quite important. This needs to be supported with an intensive socialization process to avoid any perception of people who think that redenomination with sanering. Although the implementation of redenomination need more costs, such us the socialization costs, restructuring charges and the cost of printing new money. In terms of accounting, redenomination does not have a significant effect, the company just needs to do the restatement for comparative financial statements and full disclosure. Redenomination will not have negative effects on the economy, strong economy and stable political will facilitate the process of redenomination. If businesses believe that the economy is performing well, redenomination could be in line with expectations. However, redenomination resulted in increased inflation if businesses believe that economy slowed or worsened when the policy was implemented. Successful redenomination could only be done at the time of inflation and inflation expectations stable and low.

PENDAHULUAN

Redenominasi menjadi salah satu topik hangat yang sedang diperbincangkan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Wacana mengenai redenominasi yang dulu pernah dikemukakan oleh Bank Indonesia (BI) sekarang sudah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah, bahkan payung hukum Rancangan Undang-undang Redenominasi kini telah masuk dalam program legislasi nasional tahun 2013. Dengan kebijakan redenominasi, maka nilai nominal yang tertera dalam mata uang rupiah akan dikurangi tiga angka nol di belakang, sebagai contoh nilai Rp 1.000 akan berubah menjadi Rp 1. Ada tiga alasan Indonesia menerapkan redenominasi, yaitu inflasi di Indonesia terkendali (di bawah 10 persen),menurunnya nilai utang yang dimiliki oleh pemerintah berdasarkan persentase Produk Domestik Bruto (PDB) dan kondisi perekonomian yang stabil.

Proses untuk mewujudkan kebijakan redenominasi membutuhkan usaha pemerintah yang intensif melalui sosialisasi informasi redenominasi terhadap semua masyarakat, agar masyarakat dapat membedakan persepsi mengenai redenominasi dan sanering. Hal ini perlu dilakukan, karena banyak masyarakat yang salah persepsi dengan

menanggapi bahwa redenominasi sama dengan sanering. Untuk menghindari konsekuensi sosial maupun psikologis atas kebijakan redenominasi bagi masyarakat, maka Bank Indonesia (BI) dan pemerintah harus melakukan sosialisasi secara memadai. Pemahaman masyarakat Indonesia terhadap masalah-masalah perekonomian maupun keuangan sangat beragam. Hal ini perlu didukung melalui koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan seluruh pemangku kepentingan terkait kebijakan tersebut.

Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral berencana mengeluarkan kebijakan redenominasi dengan alasan bahwa uang pecahan terbesar Indonesia, Rp100.000, merupakan yang terbesar kedua di dunia, setelah Vietnam dengan pecahan terbesar 500.000 dong. Jika memperhitungkan Zimbabwe, yang pernah mencetak pecahan 100 miliar dolar, pecahan Rp100.000 menempati urutan ketiga terbesar di dunia. Beberapa pakar ekonomi juga menyatakan bahwa pada prinsipnya mendukung redenominasi karena akan meningkatkan efisiensi transaksi dan pembukuan. Sementara beberapa ekonom lain justru memberikan persepsi bahwa rencana kebijakan redenominasi dilakukan untuk mengalihkan kelemahan nilai tukar rupiah yang seharusnya dapat dikelola dengan baik oleh Bank Indonesia (BI). Seperti yang terjadi pada kebijakan privatisasi, redenominasi juga dinilai berpotensi *moral hazard*. Hal ini mengindikasikan tidak tertutup kemungkinan, proyek ini akan dimanfaatkan kalangan tertentu untuk mengeruk keuntungan, apalagi saat ini sudah menjelang Pemilu 2014 (Ma'ruf, 2013).

DEFINISI REDENOMINASI

Menurut Bank Indonesia (BI), redenominasi adalah proses menyederhanakan penyebutan atau penulisan denominasi (pecahan) rupiah dengan cara menghilangkan sejumlah angka nol tanpa mengurangi daya beli atau nilai mata uang tersebut. Redenominasi berbeda dengan sanering, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel Perbandingan Redenominasi dengan Sanering

	Redenominasi	Sanering
Perbedaan	Menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut	Pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Hal yang sama tidak dilakukan pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat menurun
Dampak terhadap Masyarakat	Tidak ada kerugian karena daya beli tetap sama	Menimbulkan banyak kerugian daya beli turunan dratis

Tujuan	Penyederhanaan pecahan uang agar lebih efisien dan nyaman dalam melakukan transaksi	Mengurangi jumlah uang yang beredar akibat lonjakan harga-harga. Dilakukan karena terjadi hiperinflasi (inflasi yang sangat tinggi)
Nilai uang terhadap barang	Tidak berubah karena hanya cara penyebutan dan penulisan pecahan uang saja yang disesuaikan	Berubah menjadi lebih kecil, karena yang dipotong adalah nilainya.
Kondisi saat ini	Kondisi makro ekonomi stabil, ekonomi tumbuh dan inflasi terkendali	Dilakukan dalam kondisi makroekonomi tidak sehat, inflasi sangat tinggi (hiperinflasi)
Masa transisi	Dipersiapkan secara matang dan terukur sampai masyarakat siap, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat	Tidak ada masa transisi, dilakukan secara tiba-tiba
Contoh	Bila terjadi redenominasi 3 digit (3 angka nol): dengan uang sebanyak 4,5 tetap dapat membeli 1 liter bensin, karena harga 1 liter bensin juga dinyatakan dalam satuan pecahan yang sama (baru)	Bila terjadi sanering per seribu rupiah: dengan 4,5 hanya dapat membeli 1/1000 (0.001 liter)

BIAYA REDENOMINASI

Berbagai pihak perbankan berpendapat bahwa implementasi redenominasi membutuhkan biaya besar. Dengan kebijakan redenominasi, maka perbankan perlu menyesuaikan sistem teknologi informasi jika kebijakan tersebut benar-benar diimplementasikan. Alasannya, dalam masa transisi ada dua mata uang yang berlaku, yakni rupiah lama dan rupiah baru, sehingga perbankan harus mengubah komputerisasi untuk mengakomodasi hal tersebut. Selain itu, biaya sosialisasi redenominasi diperkirakan membutuhkan dana yang sangat besar. Biaya lain yang jumlahnya sangat besar adalah biaya pencetakan uang baru. Jika jumlah uang yang beredar per September 2012 mencapai 3.125 triliun rupiah maka biaya penggantian uang baru biasanya sekitar 1,8 persen dari uang beredar. Berarti, biaya yang harus dikeluarkan setidaknya 56 triliun rupiah. Biaya yang diperlukan tersebut riil dianggarkan dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara.

DAMPAK REDENOMINASI

Redenominasi dapat menyebabkan konsekuensi menguntungkan dan konsekuensi yang merugikan. Kebijakan tersebut dapat menimbulkan reaksi masyarakat yang berlebihan. Konsekuensi yang menguntungkan masyarakat bahwa redenominasi dapat menyederhanakan mata uang. Konsekuensi yang dianggap kurang menguntungkan yaitu kebijakan tersebut membutuhkan biaya yang besar, yaitu untuk pengaturan sistem, infrastruktur dan penyesuaian materi cetak. Nilai biaya yang dipastikan membutuhkan biaya besar yaitu untuk pencetakan uang kembali. Bank Indonesia (BI) akan memperhatikan dampak sosial yang akan terjadi setelah kebijakan redenominasi diterapkan, yaitu trauma masyarakat terhadap kebijakan sanering yang pernah terjadi pada tahun 1966. Adanya kekhawatiran persepsi masyarakat seperti pada saat Orde Lama, sehingga masyarakat tidak percaya pada rupiah.

Dalam pasar modal, wacana redenominasi tidak akan berdampak besar, karena redenominasi tidak dianggap sebagai fenomena negatif yang dapat menimbulkan reaksi pasar yang negative. Ditinjau dari aspek investasi asing, kebijakan redenominasi tidak akan berdampak negatif terhadap investasinya, karena redenominasi tidak mengurangi nilai mata uang dalam negeri. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah ketika penerapan redenominasi justru perlu dilakukan karena nominal mata uang Indonesia terbilang besar. Di seluruh negara, hanya Indonesia dan Vietnam yang nominasi mata uangnya besar. Redenominasi yang direncanakan telah dipertimbangkan tidak akan berdampak negatif terhadap sektor industri, karena pelaku industri akan menyesuaikan dengan kebijakan tersebut.

IMPLIKASI REDENOMINASI

Program penyederhanaan jumlah digit pada denominasi mata uang tanpa mengurangi nilainya dianggap cukup penting. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tukar mata uang rupiah. Untuk mencapai kesuksesan program tersebut maka dibutuhkan *strong leadership* di tingkat pusat maupun di sektor fiskal dan moneter. Redenominasi menguntungkan profesi akuntansi, karena pelaporan keuangan menjadi lebih sederhana. Menurut Sudibyo (2013) dalam era transisi menuju redenominasi, hal yang paling penting dilakukan adalah adanya *full disclosure*. Pelaporan keuangan suatu perusahaan juga akan dibuat ganda, yaitu dinyatakan dalam rupiah lama dan dalam rupiah yang redenominated. *Restatement* laporan keuangan juga perlu dilakukan ketika menyajikan laporan keuangan

secara komparatif dengan beberapa periode sebelumnya, karena di saat transisi semua nilai rupiah diredenominasi.

HUBUNGAN REDENOMINASI DENGAN INFLASI

Kebijakan redenominasi menimbulkan tindakan yang tidak optimis di beberapa pihak, hal ini berkaitan dengan masalah persiapan yang harus matang menjelang penerapan kebijakan tersebut. Berdasarkan pengalaman pada tahun 1960 masyarakat Indonesia dapat berasumsi negatif terhadap kebijakan redenominasi. Masalah besar yang akan muncul yaitu ketika masyarakat berpikir bahwa kebijakan redenominasi akan segera diterapkan. Sampai saat ini, masalah redenominasi masih dalam tahap konsultasi publik dengan para ahli dan pelaku pasar, karena hal ini terkait dengan psikologi pasar.

Kebijakan redenominasi juga tidak berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena pertumbuhan ekonomi suatu negara cenderung didukung oleh kegiatan ekspor yang berdampak pada neraca perdagangan. Penerapan kebijakan redenominasi yang dilakukan secara terburu-buru diindikasikan dapat mendorong tingkat inflasi di Indonesia, karena masyarakat yang merasa belum siap berpikiran bahwa redenominasi sama halnya dengan peristiwa sanering yang pernah terjadi di Indonesia (Aviliani, 2013). Pengaruh redenominasi tersebut secara psikologis berimbas pada kalangan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini dapat memicu kenaikan harga-harga barang di pasar secara serempak, sehingga akan terjadi inflasi. Dampak tersebut hanya terjadi dalam rentang waktu yang cepat, karena setelah inflasi terjadi, kemudian kondisi akan menjadi normal.

Inflasi yang terjadi akibat redenominasi akan terlihat pada penurunan daya beli masyarakat. Dari sisi kalangan pengusaha memandang minor redenominasi dengan menyatakan bahwa wacana tersebut belum perlu dilakukan. Sedangkan pihak Bank Indonesia menepis akan terjadinya inflasi dalam waktu dekat, karena Bank Indonesia telah melakukan kalkulasi terhadap semua risiko yang muncul, termasuk inflasi. Kebijakan redenominasi juga membutuhkan waktu yang panjang, sehingga potensi dari risiko yang ada dapat diminimalisir pada masa transisi.

SIMPULAN

Penerapan kebijakan redenominasi bukanlah hal yang sederhana, hal ini perlu didukung dengan proses sosialisasi yang intensif untuk menghindari terjadinya salah persepsi masyarakat yang menganggap bahwa redenominasi sama dengan sanering. Beberapa alasan Indonesia mempunyai wacana redenominasi (i) nilai inflasi di Indonesia yang terkendali, yaitu di bawah 10 persen, (ii) utang pemerintah dari persentase Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan, (iii) kondisi perekonomian yang stabil. Dari sisi akuntansi, redenominasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan, karena hanya berdampak pada pengurangan tiga digit angka pada nominal yang ada di laporan keuangan. Perusahaan hanya perlu melakukan *restatement* untuk komparasi laporan keuangan dan lebih *full disclosure*. Redenominasi tidak akan berdampak negative terhadap perekonomian. Hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi dan politik yang stabil agar mensukseskan proses redenominasi. Untuk mendukung hal tersebut, pelaku bisnis harus yakin bahwa ekonomi akan mengalami pertumbuhan. Namun redenominasi mengakibatkan angka inflasi meningkat jika pelaku bisnis berpersepsi ekonomi melambat atau memburuk ketika kebijakan itu diterapkan. Sukses redenominasi hanya bisa dilakukan pada saat inflasi dan ekspektasi inflasi stabil dan rendah.

DAFTAR PUSATAKA

- Sudibyo, Bambang. 2013. “Implikasi Redenominasi”. Akuntan, Januari-Maret 2013.
- Aviliani, dkk. 2013. “Menakar Pil Pahit Sensasi Redenominasi”. Akuntan, Januari-Maret 2013.
- Warsito, Ito. 2013. “Redenominasi dalam Perspektif Akuntan”. Akuntan, Januari-Maret 2013.
- Hartono, Jogiyanto. 2005. *Pasar Efisien Secara Keputusan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mishkin, Fredeic S. 2001. *The Economics of Money, Banking, and Financial Market*. USA: Person Education.
- Nafi, Muchamad dan Anton Aprianto. 2008. “Berharap Pada Sepuluh Perintah”. TEMPO, Edisi 13-19 Oktober 2008.

www.bi.go.id

www.detikfinance.com

www.kompas.com

www.tempointeraktif.com